

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 KEPADA 37 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA SE-JAWA TIMUR SECARA SERENTAK

Sidoarjo, Kamis (2 Mei 2024) – Secara serentak, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 kepada 37 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan terdahulu, BPK telah menyerahkan LHP LKPD TA 2023 Kota Madiun pada 28 Maret 2024 yang lalu dan juga telah diserahkannya LHP LKPD TA 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada pagi tadi.

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur **Karyadi**, menyerahkan LHP atas LKPD Tahun 2023 kepada pimpinan DPRD dan Kepala Daerah di Kantor BPK Jawa Timur. Dalam penyerahan LHP secara serentak turut hadir Anggota V BPK RI, **Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M., CSFA, CGRE, CertDA, CFrA**. Pj. Gubernur Jawa Timur, **Adhy Karyono, A.Ks., M.A.P.** juga hadir menyaksikan acara tersebut. Berdasarkan LHP yang diserahkan hari ini, 37 pemerintah daerah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Rincian Opini atas LKPD dan prosentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada 37 pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

No	Entitas	Opini		Opini WTP berturut-turut ke-	Prosentase Penyelesaian TLRHP s.d. Semester II 2023	No	Entitas	Opini		Opini WTP berturut-turut ke-	Prosentase Penyelesaian TLRHP s.d. Semester II 2023
		TA 2022	TA 2023					TA 2022	TA 2023		
1	Kab Bangkalan	WTP	WTP	7 kali	94,80%	21	Kab Ponorogo	WTP	WTP	12 kali	88,73%
2	Kab Banyuwangi	WTP	WTP	12 kali	87,68%	22	Kab Probolinggo	WTP	WTP	11 kali	94,05%
3	Kab Blitar	WTP	WTP	8 kali	94,97%	23	Kab Sampang	WTP	WTP	6 kali	92,54%
4	Kab Bojonegoro	WTP	WTP	10 kali	91,18%	24	Kab Sidoarjo	WTP	WTP-PHL	11 kali	89,90%
5	Kab Bondowoso	WTP	WTP	10 kali	92,28%	25	Kab Situbondo	WTP	WTP	8 kali	94,33%
6	Kab Gresik	WTP	WTP	9 kali	90,14%	26	Kab Sumenep	WTP	WTP	7 kali	91,24%
7	Kab Jember	WTP	WTP	2 kali	82,34%	27	Kab Trenggalek	WTP	WTP	8 kali	93,29%
8	Kab Jombang	WTP	WTP	11 kali	92,57%	28	Kab Tuban	WTP	WTP	9 kali	96,14%
9	Kab Kediri	WTP	WTP	8 kali	94,76%	29	Kab Tulungagung	WTP	WTP	5 kali	95,83%
10	Kab Lamongan	WTP	WTP	8 kali	91,24%	30	Kota Batu	WTP	WTP	9 kali	84,25%
11	Kab Lumajang	WTP	WTP	6 kali	90,69%	31	Kota Blitar	WTP	WTP	14 kali	94,54%
12	Kab Madiun	WTP	WTP	11 kali	98,59%	32	Kota Kediri	WTP	WTP	10 kali	94,28%
13	Kab Magetan	WTP	WTP	10 kali	94,24%	33	Kota Malang	WTP	WTP	13 kali	86,11%
14	Kab Malang	WTP	WTP	10 kali	94,43%	34	Kota Mojokerto	WTP	WTP	10 kali	96,27%
15	Kab Mojokerto	WTP	WTP	10 kali	89,83%	35	Kota Pasuruan	WTP	WTP	4 kali	87,34%
16	Kab Nganjuk	WTP	WTP	7 kali	93,50%	36	Kota Probolinggo	WTP	WTP	7 kali	95,76%
17	Kab Ngawi	WTP	WTP	11 kali	95,46%	37	Kota Surabaya	WTP	WTP	12 kali	94,58%
18	Kab Pacitan	WTP	WTP	11 kali	92,60%						
19	Kab Pamekasan	WTP	WTP	10 kali	93,65%						
20	Kab Pasuruan	WTP	WTP	11 kali	90,05%						

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Telp : (031) 8669244

Fax : (031) 8669206

Email: humas.jatim@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Dengan demikian, seluruh LHP LKPD telah diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah dan seluruhnya telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan opini LHP atas LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Hal Lain (**WTP PHL**).

Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang **kewajaran** penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai "**kewajaran**" penyajian laporan keuangan dan "**bukan merupakan jaminan**" bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya *fraud* atau tindakan kecurangan lainnya.

Pada pemeriksaan atas LKPD Tahun 2023 terhadap 37 pemerintah daerah, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD. Permasalahan tersebut di antaranya:

1. Masih terdapat Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Belum Dilakukan Secara Tertib;
2. Masih terdapat Proses Penyusunan Anggaran dan Realisasi Belanja Belum Sesuai Ketentuan;
3. Masih terdapat Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Belum Tertib;
4. Masih terdapat Pembayaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum Belum Berdasarkan Data Pemakaian Listrik yang Akurat;
5. Masih terdapat Kekurangan Volume, Kelebihan Pembayaran atau Keterlambatan penyelesaian Pekerjaan atas Pekerjaan Belanja Modal dan Barang; dan
6. Masih Terdapat Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Belum Dilaksanakan Secara Optimal dan Terintegrasi.

Sebelum LHP atas LKPD Tahun 2023 diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada 37 pemerintah daerah atas Konsep Hasil Pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh 37 pemerintah daerah tersebut. Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi, berharap LKPD yang telah diperiksa oleh BPK (LKPD *audited*), dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh DPRD dan pemerintah daerah, terutama terkait dengan penganggaran. "Meski memperoleh opini WTP, kami minta pemerintah daerah tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP," pesannya. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP. Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Pada kesempatan yang sama, sebelum diserahkannya LHP atas LKPD, BPK Jatim juga mengadakan seremonial pembukaan Plaza BPK Jatim dan diresmikan langsung oleh Anggota V BPK RI, **Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit** serta disaksikan langsung oleh seluruh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD di wilayah Jawa Timur. Plaza BPK Jatim merupakan simbol dari sinergi BPK dengan pemerintah daerah dan lembaga legislatif di wilayah Jawa Timur sebagai bentuk bahwa BPK menyatu dan tidak menjaga jarak dengan seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Telp : (031) 8669244

Fax : (031) 8669206

Email: humas.jatim@bpk.go.id